



▶ Masyarakat Jogja diminta aktif mengontrol

Herry: Laporkan kalau ada korupsi



HARIAN JOGJA/NADIA MAHARANI

BERANTAS KORUPSI: Walikota Jogja, Herry Zudianto (*kiri*), bertekad menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi. Untuk itu Pemkot Jogja membentuk Unit Pelayanan dan Keluhan Masyarakat (UPIK). Dia juga ingin masyarakat berperor serta aktif dengan melapor, bila tahu ada praktik korupsi. Tekak itu dikemukakan pada diskusi di UGM, kemarin.

JOGJA: Partisipasi masyarakat dalam mengontrol tindak korupsi di Pemkot Jogja melalui layanan UPIK (Unit Pelayanan dan Keluhan Masyarakat) sangat dibutuhkan.

Oleh Nadia Maharani
HARIAN JOGJA

Herry Zudianto, Walikota Jogja, mengatakan, masyarakat bisa segera melaporkan tindakan korupsi kapan saja, bahkan melalui SMS. Dengan begitu, ujarnya, masyarakat dapat membantu pemkot menanggulangi masalah korupsi.

"Pemkot Jogja memutuskan berubah secara evolutif atas kesadaran dan kemauan sendiri, un-

tuk menjadi lebih bersih dan baik sesuai hakikat *clean government* dan *good governance*," ujarnya, dalam diskusi *Policy Corner* di Magister Studi Kebijakan (MSK) Universitas Gadjah Mada (UGM), kemarin.

Menyongsong paradigma memerangi korupsi dan menjadi *clean government* dan *good governance*, ujarnya, perlu dilakukan pendekatan organisasi, regulasi, kesejahteraan pegawai dan moralitas.

Dia juga menjelaskan, dalam implementasinya, selain UPIK, Dinas Perizinan dan tim kerja maupun kelembagaan *ad hoc* yang ditu-

jukan memperbaiki akuntabilitas kinerja birokrasi pun dibentuk. Dinas Perizinan dibuat, ujarnya, guna menyatukan wewenang dan fungsi pelayanan perizinan.

"Dengan demikian, akuntabilitas publik dan transparansi pada masyarakat dapat diberikan. Selain itu juga memudahkan proses pengawasan terhadap jalannya fungsi pelayanan perizinan," tuturnya.

Sementara itu Manajer Riset dan Kebijakan *Transparency International Indonesia* (TII), Frenky Simanjuntak, menjelaskan, meski Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Jogja pada 2008 sebesar 6,43, tidak berarti sudah bersih dari korupsi. Sedangkan secara nasional, lanjutnya, IPK rata-rata masih 4,42.

"Berdasar persepsi para pelaku bisnis di Jogja, praktik korupsi sudah tidak terlalu banyak terjadi. Selain itu, aparat dan penda sudah serius menanggulangi masalah korupsi," jelasnya.

Dia juga mengatakan, proses pengadaan barang dan jasa perlu diprioritaskan untuk usaha perbaikan. Penerapan pakta integritas dalam pengadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu solusi.

"Persepsi pelaku bisnis yang menjadi indikator utama IPK bisa saja berubah, jika pemerintah tidak konsisten dalam mempertahankan inisiatif untuk memberantas korupsi," kata Frenky.

Dihnturkan Kepada Yth. :
 1. Walikota Yogyakarta
 2. Wakil Walikota Yogyakarta
 3. Sekretaris Daerah
 4. Asisten

Tembusan Kepada Yth.:

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005